

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pada saat ini hampir diseluruh instansi pemerintah staf atau karyawan yang bekerja dibagian keuangan dituntut untuk lebih mengetahui tentang bagaimana cara menata kelola keuangan serta menyajikan hasil laporan keuangan guna mempermudah penyusunan anggaran diinstansi masing-masing. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia yang handal didalam perusahaan atau instansi saat ini dengan berkembangnya zaman ke era digital dan sedikit demi sedikit perubahan sistem pengelolaan keuangan menjadi lebih canggih. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,) Lampiran I SAP Berbasis AkruaI.

Saat ini akuntansi telah mengalami evolusi. Secara tradisional (dulu) akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas dan melaporkan transaksi (peristiwa) bisnis dan sistem akuntansi merupakan integrasi dari prosedur- prosedurnya. Sebagai seni peran manusia dalam akuntansi sangat

dominan. Akuntan atau orang bagian akuntansi saat itu sering berperan sebagai 'seniman' dalam menerapkan praktek akuntansi, hal ini dapat terjadi mungkin karena belum dikenal atau belum diterapkannya standar akuntansi bagi suatu organisasi perusahaan. Belum dapat diterapkannya standar akuntansi tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor yang berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Diantaranya disebabkan oleh pengetahuan SDM bagian akuntansi suatu perusahaan yang belum mampu melakukannya dengan benar karena berbagai sebab, seperti masalah kejujuran yang dengan sengaja memanipulasi data dan proses akuntansi untuk keuntungan pribadi, kelompok atau perusahaan. (Susanto.Azhar, 2017: 4)

Menerapkan sikap tidak jujur pada saat melakukan pekerjaan menjadi hal yang paling fatal dan sangat berpengaruh terhadap citra instansi perusahaan. Menurut berita yang dilansir oleh CNBC, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan skor Program Penilaian Pelajar Internasional atau biasa disebut PISA menurun. Artinya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum optimal. Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya. "Di tahun 2020 kita melihat kualitas SDM di Indonesia belum optimal, skor PISA kita malah turun, kompetensi guru antar wilayah belum merata, kemudian kita bisa mencatat porsi anggaran PAUD belum memadai hanya 0,2%," jelas Askolani di ruang rapat Banggar DPR, Rabu (1/7/2020).

Fenomena tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya kompetensi SDM terlebih tentang sikap untuk menciptakan suasana pekerjaan menjadi positif dimata public. Sebagaimana hasil penelitian M. Yusuf Asril, Terdapat kecenderungan, ketika Kompetensi Sumber Daya Manusia semakin baik, maka Kualitas Laporan Keuangan juga semakin baik. (M.Yusuf Asril, 2017)

Dengan berkembangnya zaman yang hampir semua negara sudah menerapkan teknologi guna mempersingkat waktu kerja dan menjadi jalan alternatif untuk semua pekerjaan sehingga membuat semua perusahaan atau instansi bergantung pada teknologi yang saat ini digunakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seiring perkembangan system informasi akuntansi di Indonesia pun, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja organisasi menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan para staf atau pegawai memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Teknologi informasi juga merupakan segala cara atau alat yang mampu digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan data secara elektronik menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainya (Widyaningtias, 2014). Untuk memenuhi pengelolaan diberbagai bidang system manajemen SDM yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan, dibutuhkannya organisasi yang sering berhubungan dengan instansi pemerintahan. Akuntabilitas laporan keuangan yaitu syarat terciptanya penyelenggara pemerintah yang baik, demokrasi, dan amanah.

Sistem informasi akuntansi diciptakan dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang terdapat dari beberapa sumber dan mempermudah untuk mengambil keputusan setelah data tersebut menjadi sumber informasi akuntansi. Adapun peran Sistem Informasi Akuntansi untuk dapat memenuhi tujuan yaitu dengan mengolah data transaksi, menyimpan data untuk tujuan dimasa yang akan datang, memberikan pemakai atau pengambil keputusan, dan mengontrol semua proses yang sedang terjadi.

Seperti berita yang dilansir oleh klikanggaran.com Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019 yang di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentang BPK menemukan terdapat penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, saldo kas tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat/ belum disetor dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 Kementerian dan/atau Lembaga (K/L). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2018, telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengendalian dan pengelolaan kas pada Kementerian/Lembaga belum memadai berdampak adanya rekening penampungan yang belum teridentifikasi, penyetoran sisa Kas tidak tepat waktu, pengelolaan dana menggunakan rekening pribadi, dan penggunaan Kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar (a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi penatausahaan

rekening penampungan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan membuat kebijakan akuntansi yang seragam; dan (b) Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas ketepatan waktu penyetoran sisa kas, ketertiban penggunaan rekening pribadi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) Melakukan evaluasi pengelolaan Rekening Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga (K/L); (b) Melakukan simplikasi dan restrukturisasi Rekening Pemerintah pada K/L; (c) Mengembangkan sistem monitoring, pengendalian, dan optimalisasi Rekening Pemerintah pada K/L melalui Aplikasi SPRINT yaitu Aplikasi berbasis web-based dan terlepas dari Aplikasi SPAN/SAIBA/E-Rekon&LK untuk digunakan monitoring saldo dan Rekening Pemerintah sehingga semua Rekening Pemerintah dapat teridentifikasi; dan (d) Menetapkan kebijakan akuntansi terkait rekening penampungan pada seluruh K/L yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2019 pada Bab III Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.

Fenomena tersebut menjelaskan perihal Sistem Informasi Akuntansi yang belum digunakan semaksimal mungkin sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum maksimal dan masih berdampak negatif, sehingga pihak BPK menyarankan pihak menteri keuangan untuk menerapkan aplikasi akuntansi guna mempermudah satuan kerja pemerintahan dalam bagian keuangan agar menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dengan pernyataan bahwa laporan keuangan dihasilkan

dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Irzal Tawaqal dan Suparno, 2017).

Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh keuangan satuan kerja kodam XIV/Hsn Makassar pun menggunakan aplikasi SAIBA. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) merupakan software yang digunakan oleh bagian keuangan satuan kerja kodam XIV/Hsn Makassar yang sebelumnya menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA). SAIBA merupakan sistem akuntansi keuangan yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) berbasis akrual, yang sebelumnya SAKPA lalu diperbaharui dengan ditambahkan fitur Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Penggunaan SAIBA ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan yang sudah diterapkan sejak Januari 2015, yang diharapkan SDM tidak mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi tersebut. Sesuai dengan fenomena diatas juga penerapan sistem informasi akuntansi dengan aplikasi akuntansi SAIBA yang sudah disarankan oleh pihak BPK diharapkan agar tidak ada kecurangan untuk penyajian laporan keuangan, serta penggunaan aplikasi akuntansi SAIBA mempermudah pihak BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian/Lembaga yang ada diseluruh Indonesia.

Dalam studi kasus yang ditulis oleh penulis ini dikarenakan penelitian dilingkungan militer masih minim dan ingin mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi dibidang keuangan disatuan militer dengan kementerian lainnya. Berdasarkan uraian diatas penulis juga tertarik untuk membuat laporan penelitian tentang kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dituangkan dalam penelitian berjudul **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KODAM XIV/HASANUDDIN MAKASSAR.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Masih adanya sumber daya manusia dibidang pengelolaan administrasi keuangan yang belum memahami akuntansi maupun sistem informasi akuntansi.
2. Masih adanya penerapan aplikasi dan administrasi keuangan di tingkat satuan terpicil yang belum maksimal dikarenakan terkendala pada sistem informasi yang tersedia.
3. Terdapat beberapa kualitas laporan keuangan yang belum maksimal di beberapa satuan kerja.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil latar belakang diatas, maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak instansi secara ilmiah ataupun secara praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara ilmiah semoga dapat memeberikan pencerahan terhadap pihak instans/  
perusahaan.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu  
pengetahuan dan menjadi sarana informasi bagi para pembaca yang akan  
melakukan penelitian yang sama.

### **1.5.2. Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu SDM instansi/perusahaan menambahkan ilmu akuntansi, khususnya dibidang system informasi akuntansi yang berkembang sangat pesat pada saat ini. Serta diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan untuk sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan pekerjaan dibidang keuangan.